

**STUDI EKSPLORATIF PEMIKIRAN DAN PRAKTEK POLITIK
TENTANG DEMOKRASI DHARMA (TAIWAN) DAN DEMOKRASI
PARTISIPATIF (VENEZUELA)**

Sahrudin Lubis¹ dan Hari Zamharir**

Abstract

This study explores two cases of political thought and practice distinctive, different model with a well-established model of "liberal democracy"-i.e. western democracy in Taiwan dharma or communal and participative democracy in Venezuela times lately. This object has a very important position for learning democracy for the peoples of the Third World nations. Research on the model of the democratic model is motivated by the fact that many countries in the Third World have difficulties when adopting an established model of Western democracy. Indonesia has implemented two liberalization period, namely the reform era of parliamentary democracy and liberal democracy with a multi-party system. Theorizing about the purpose and development of democracy rests on the cultural context. The theory used in this study is the theory of political development and democratic theory contextual community culture method used was a descriptive-analytical study, the historical approach of George H Sabine (SP Varma; 1987), with stages of research: (a) exploration of materials , (b) description of the object of study, (c) the search theory of democracy and the culture of the community, (d) selection is critical of theories of ethnocentrism and bias-libertarian secular ideology, and (e) interpretation. An important finding of this study is that (a) political history and the emergence of political and social reformers is a determinant factor for the survival of democracy contextual culture experiments, (b) experiment participatory democracy in Venezuela and democracy in Taiwan lately Dharma presents a unique characteristic, different with secular democracy-libertarian West, with coverage of the property and the value aspect of religious ideas.

Keywords: alternative model of democracy, cultural context, political history, political opinion, religion,

^{*},^{**}Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

A. Pendahuluan

Sejarah panjang modernisasi yang dilakukan banyak negara berkembang telah menerapkan salah satu bidang yakni demokratisasi politik. Dalam upaya penerapan dan adopsi teori demokrasi, berbagai bangsa selama kurun 1960-an hingga 2000-an kebanyakan merujuk kepada model demokrasi mapan yang datang dari pusat difusi modernisasi, yakni demokrasi Barat, dalam arti demokrasi secular-libertarian. Di Barat, demokrasi dalam aspek ideologisnya ada dua: yang *pertama* adalah *secular-libertarian*—yang secara awam dikenal demokrasi liberal, dan kedua adalah *social democracy*. Secara geografis, ada model Anglo-Saxon di Amerika Utara yang model demokrasiya berbeda dengan model Kontinental di Eropa Barat). Meski dipahami bahwa dunia perpolitikan memiliki dimensi dan aspek yang kompleks, namun dari sudut pandang difusi modernisasi, sistem dan nilai nilai demokrasi merupakan hal-hal yang memiliki substansi berbeda dengan sistem dan nilai politik negara-negara baru di Asia Afrika. Akibat perbedaan-perbedaan itu, berbagai jalan demokratisasi negara-negara tersebut seringkali menimbulkan masalah, seperti jalan demokratisasi politik yang tidak menghasilkan bentuk-bentuk kehidupan politik yang demokratis; yang terjadi adalah adanya pemaksaan dan ketegangan akibat adopsi dan adaptasi model secular-libertarian. Studi ini mencoba mengangkat jalan demokratisasi lain yang dikembangkan di dua kasus kebudayaan—yang pertama adalah “Demokrasi Dharma” di Taiwan, dan kedua, demokrasi partisipatif di Venezuela yang pada masa Hugo Chaves. Masalah yang akan dipecahkan adalah jalan salah mencangkok gagasan, system dan nilai-nilai demokrasi yang berasal dari negara maju, dengan cara mengembangkan bentuk bentuk demokrasi yang berakar pada kultur masyarakatnya sendiri

Mencari alternatif yang sesuai menjadi signifikan mengingat kenyataan adanya kajian kajian tentang demokratisasi dan pembangunan politik di beberapa pengalaman yang dialami berbagai Negara. Kajian Kanchan Chandra (2004), misalnya mencoba mencari tahu mengapa politik etnis di India begitu dominan. Di balik gemerlapnya sistem politik demokratis India yang dicap sebagai Negara sekuler yang menerapkan sistem politik demokratis Barat modern, Chandra dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan politik mikro (micro politics) dan penerapan metode antropologis sampai kepada temuan yang kontras dengan system yang secara makro bercorak demokrasi secular libertarian: kepolitikan etnis ternyata amat dominan dan bahwa kultur politik yang berlaku bukan yang

datang dari Barat, melainkan lebih kental dengan praktek kerjasama karena hubungan patron-klien yang merujuk kepada kepentingan etnis dan leverage ekonomi—bentuk yang Chandra sebut sebagai demokrasi patronase. Di Eropa barat, kajian tentang model demokrasi menghasilkan temuan tentang apa yang disebut dengan demokrasi konsosisional: sistem dan nilai-nilai politik demokrasinya memiliki konteks kebudayaan Eropa Barat yang tidak persis sama dengan demokrasi *secular-liberatrian* Anglo Saxon. Meski argumen Prof. Thomas Meyer masih terkesan amat normatif, yakni perbedaan pokok antara “demokrasi liberal” atau kini neo-liberalisme dalam ekonomi politik dengan “sosial demokrat”, namun yang penting dalam konteks makalah ini adalah posisi Meyer yang membela adanya demokrasi versi lain selain demokrasi liberal. Meyer menulis :

“libertarian-mode of democracy is based on state-free or individual liberty philosophy whereas social democracy on ‘regulated social market economy’; and these two are competing models to fill the frame of liberal democracy—except that social democracy is associated with European politics”.

Di Indonesia, model “demokrasi liberal” selama masa euphoria kemerdekaan hingga 1959 juga menerapkan demokrasi Anglo-Saxon, dalam kemudian di era reformasi sekarang juga mengadopsi sistem politik demokrasi Anglo Saxon ini. Teori teori tentang demokrasi dan kultur masyarakat yang ada pada umumnya mengasumsikan diadopsinya model demokrasi mapan, padahal teori teori demikian belum tentu tepat untuk diterapkan. Poin penting kajian kajian dan praktek politik di atas adalah bahwa ada keperluan untuk menemukan model demokrasi yang kontekstual dengan kebudayaan masyarakatnya.

Masalah yang ditangani dalam penelitian ini ialah bagaimana konstruksi pemikiran dan praktek politik demokratis yang berbeda dengan model demokrasi *secular-libertarian* yang mapan. Konstruksi pemikiran dan praktek politik ini akan mengambil kasus di Taiwan masa kini yang tengah menempuh jalan transisi menuju demokrasi (TMD) dengan peranan reformasi agama yang ada Taiwan; kasus kedua, adalah konstruksi pemikiran dan praktek demokrasi partisipatif di Venezuela dijalankan rezim Hugo Chavez.

Asumsi yang menjadi panduan kajian ini adalah bahwa model-model demokrasi yang dapat dijalankan dengan baik haruslah model-model yang sesuai dengan konteks budaya masyarakatnya. Asumsi ini menunjuk kepada

penolakan prosedur difusi modernisasi yang menjadikan model mapan sebagai model yang menjadi contoh untuk diterapkan.

Alternatif terhadap model dari luar –dan cenderung tidak cocok dijalankan oleh system kebudayaan lain—memiliki peluang untuk dikembangkan, sebagaimana obyek kajian ini akan diteliti: di Taiwan, model demokrasinya memiliki kekhasan; demikian pula model demokrasi partisipatif. Dalam konsep teoretis, model demokrasi Anglo-Saxon secara prinsip dikategorikan ke dalam *representative democracy*; model di Venezuela tergolong *participatory democracy*.

B. Perspektif Teoretis

Ada dua arah teoretisasi demokrasi—teori universalis yang melihat tak terhindarkannya sekularisasi dan berkembangnya model demokrasi mapan ke wilayah wilayah lain di dunia, dan teori relativis yang melihat signifikannya ciri khas budaya berbagai masyarakat termasuk pengaruh agama ke dalam format demokratisasi. Teori Kultural menjadi bagian penting dalam teori demokrasi, menyaingi teori penyeragaman budaya. Banyak dari jenis kedua teori kulturalis ini akan digunakan dalam tulisan ini. (Namun demikian, Teori Kultural yang cenderung *deterministic* telah pula membuat gerah peneliti seperti Edward Bell, yang dengan menggunakan payung teori pilihan rasional, mengedepankan antithesis bahwa Teori Kultural tidak sepenuhnya berlaku: dalam kasus agama Katolik, Bell menemukan adanya bentuk bentuk tertentu pemihakan gereja Katolik terhadap demokratisasi—satu hal yang kurang dapat dijelaskan oleh Teori Kultural).

Pemaparan teori demokrasi dan kultur masyarakat ini kiranya tepat dimulai dengan tesis Madsen (2010, 59) dalam studinya tentang demokratisasi di dalam kultur Asia, dalam hal ini China, bahwa hipotesis mapan Teori Modernisasi yang menyatakan akan berlangsung sekularisasi di berbagai masyarakat ternyata tidak benar; yang muncul ternyata pada masa kini adalah kebangkitan corak dan pengaruh agama dalam transformasi sosial politik. Richard Madsen menulis, “the problem of secularization thesis—and hence for the CCP—is that it appears to be wrong. Far from inexorably receding, religions all over the world are growing and seeking increasingly vigorous engagement with public affairs. Recognizing this, many Western social theorists (even confirmed agnostics such as Jurgen Habermas) are now searching for ‘post secular’ social theories.”

Sebenarnya sejak diterimanya tesis Weber tentang pengaruh agama Protestan terhadap Kemunculan Kapitalisme—satu tesis yang kini sudah klasik—sudah memberi kita indikasi atau pertanda penerimaan gagasan tentang Teori Kultural. Kini Teori Kultural seperti menguat kembali setelah dominasi Teori Universalis. Misalnya di tahun 2000 terbit buku yang disunting Lawrence E Harrison & Samuel P. Huntington, *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. Dari judul buku itu jelas sekali isu pokok yang diusung adalah kultur atau budaya. Dalam Bagian Kedua buku itu (Culture and Political Development) terdapat karya karya Ronald Inglehart, “Culture & Democracy” (hlm. 80-97), Francis Fukuyama, “Social Capital” (98-111), dan Seymour M. Lipset & Gabriel Salzman Lenz, “Corruption, Culture & Markets” (hlm. 112-124).

Varian-varian yang tergolong ke dalam teori demokrasi yang menyertakan signifikannya kultur mungkin sebagai berikut: teori demokrasi yang mengedepankan paham pluralis, teori demokrasi berbasis gender dan atau feminisme, teori demokrasi yang mengkritisi masuknya rasisme dalam Teori Universalis, teori teori demokrasi yang membahas alternatif terhadap model demokrasi liberal—terutama teori demokrasi deliberative.

Varian lain adalah teori demokrasi eco-feminisme yang berbasis epistemology Timur dari pegiat lingkungan hidup dari India, Vandana Shiva (seorang doctor fisika), yang kini memimpin pergerakan global anti globalisasi dengan mengusung Demokrasi Bumi sebagai gerakan sosial dan pemikiran politik, dengan buku buku dan ceramah ceramahnya yang memasarkan perlunya gaya hidup baru termasuk berfilsafat tentang politik yang menjamin harmoni hidup manusia dengan keamanan sumberdaya alam.

Kajian Sandro Segre (2011, “On Weber’s and Habermas’ Democratic Theories: A Reconstruction and Comparison”, kiranya amat penting antara lain karena memunculkan kembali tema Weber yang—dalam kaitan Teori Kultural—amat relevan. Weber mendahului Almond & Verba yang dengan kajian terkenal telah menancapkan kemajuan pesat ilmu politik behavioral, melalui bukunya *Civic Culture*, sebagai satu tonggak penting kajian budaya dan politik. Misalnya Segre merekonstruksi bahwa Weber sebenarnya juga menulis suatu teori demokrasi: *pertama*, pelebagaan yang mengatakan pelebagaan dalam persaingan, termasuk bersaing antar lawan lawan politik yang membuka ruang bagi warga memilih siapa pemimpin yang paling berbakat; pelebagaan juga berarti membuka ruang bagi pendidikan politik. *Kedua*, Weber bicara tentang kematangan politik

(*politische Reife*) suatu bangsa, yang diartikan Weber sebagai kemampuan para pemilih untuk menangkap apa kepentingan bangsa yang sudah berlangsung lama; implicit juga berarti bahwa bangsa itu mampu dan mau mengupayakan.

Weber melihat bahwa kemampuan dan kemauan yang disebut terakhir itu ada hubungan dengan keberadaan tradisi berdemokrasi yang dibanggakan bangsa yang bersangkutan (Weber merujuk kepada tradisi bangsa Inggris yang memiliki tradisi berdemokrasi—dalam konteks demokrasi parlementer). Dalam aspek demokrasi perwakilan vs. demokrasi langsung, Weber melihat bahwa demokrasi langsung hanya berlaku jika ada kondisi-kondisi tertentu dan ada kaitan dengan besaran penduduk (yang sedikit) dan kompleksitas fungsi-fungsi ekonomi. Mengapa demokrasi langsung itu kasuistik, Sarge menulis, “For such conditions, as instantiated by some Swiss cantons, are exceptional and cannot be found in the modern mass States”. Sarge menyebut bahwa temuan bahwa Weber condong kepada demokrasi elitis tidaklah benar—seperti temuan Cohen (1985). Akhirnya, dari lima unsur yang diidentifikasi Sarge, unsur kelima berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan suatu tingkat kemampuan masyarakat yang perlu untuk membangun demokrasi—yakni pelembagaan perbincangan tentang urusan publik melalui kelompok dan serikat-serikat yang terorganisir. Mengapa masyarakat perlu secara intens terlibat? Bagi Weber ini untuk terhindar dari ‘ocean’ para intelektual yang menghambur-hamburkan waktu di hadapan masyarakat.

Dalam pada itu, dalam perspektif kepolitikan kiri, berkaitan langsung dengan posisi agama dalam teori demokrasi berbasis cultural, Urbinati (2008), yang menulis dalam majalah *Dissent* (6 Januari), mencoba mengategorikan dua arus cara-pandang para pendukung demokrasi (di Barat): *pertama*, teori demokrasi yang mengucilkan Islam—biasanya dirumuskan bahwa Islam tidak memiliki kompatibilitas dengan demokrasi. Penilaian bahwa Islam itu anti demokrasi adalah penilaian yang kurang tepat—seolah-olah Islam itu berwajah homogen; yang benar bagi Urbinati, Islam berwajah heterogen secara internal (Lihat Nur Cholish Setiawan tentang multi-faced Islam tentang Islam di Indonesia); lalu *kedua*, teori demokrasi yang menerima Islam. Yang kedua ini, biasanya dirumuskan bahwa Islam tidak memiliki kompatibilitas dengan demokrasi.

Urbinati mengajukan cara-pikir yang membuang block thinking: kategori pertama dia rujuk kepada *spectrum* di bawah label liberalisme militan. Ekstrimitas cara pandang militan dari kaum liberal ini

berkorespondensi dengan cara-pandang masa Perang Dingin yang percaya bahwa tidak ada gunanya berdialog dengan kaum komunis. Dulu, kata Urbinati, terhadap Komunis, para liberal militan ini menutup dialog; kini, sesudah September 11, banyak para militan ini memberlakukan sikap demikian itu terhadap Islam. Menurutny inilah block thinking yang seharusnya dibuang.

Soedjatmoko (dalam Mustafied, 2000; 167) telah mengupas problem ontologis ini dalam bukunya *Transcendence and History*. Dari judulnya saja orang dapat melihat dua “wilayah” yang di masa paradigma sekularisme masa lampau telah dipisahkan, yakni “agama” atau alam transendental; dan “sejarah sosial politik manusia” atau alam profan—dan seperti diketahui, pemecahan oleh ilmu politik modern adalah apa yang dikenal kini dengan pemisahan agama dari politik. Soedjatmoko melihat fungsi agama di bidang sosial, ekonomi dan politik adalah tetap kuat—yang fungsionalitasnya ini terwujud dengan syarat bahwa agama tidak lepas diri dari problematik sosial politik masyarakatnya. Jika diikuti proposisi Soedjatmoko di atas, maka dengan amat segera nampak bahwa tesis-tesis Karl Marx dan rumusan rumusan ideologi marxisme yang sekuler secara umum justeru berpangkal tolak dari konteks di mana agama di Eropa Barat kala itu telah lari dari tugas dan peranan sosialnya. Karena lari, muncullah bentuk bentuk sikap dan tindakan yang buruk, melahirkan Abad Kegelapan. Akibat tidak berfungsi sosial, agama meminggirkan diri dan terpinggirkan. (Kemudian kegelapan itu berhasil dibuat terang oleh Abad Pencerahan, gerakan rasionalisme yang membangkitkan kemajuan ilmu pengetahuan dan politik yang bersandarkan otonomi penuh manusia). Namun pada sejarah masa kini, mulai dirasakan bahwa politik memerlukan bimbingan dimensi-dimensi yang transenden dari agama.

Meski bukan khusus tentang Taiwan, suatu kajian makro tinjauan filosofis-agama tentang budaya Kong Hu Cu China dan Deisme Jefferson Amerika, dilakukan oleh Peter Chang (2011) dalam konteks hubungan internasional. Bagi Chang, Confusianisme China, meski memiliki kulturnya sendiri, memiliki sifat dasariah yang potensial mampu berkompromi dengan “demokrasi liberal” dan keduanya “*maintain a moderate worldview that disavows extremism. Each espouses an order grounded on civic virtues intended to militate against religious radicalism*”. Yang membedakan antara keduanya hanyalah pada strategi dan pendekatannya—seperti ditulis Chang bahwa, “*The Confucian East, I show, has had a strategy of passive*

inducement. This contrasts with the Christian West's proactive approach of overt conversion". Dalam pada itu, Huang (2000) membuat book review karya Robert P. Weller dalam *Alternatve Civilites: Democracy and Culture in China and Taiwan*. Menurutnya, Weller mengajukan tesis bahwa yang menjadi factor kuat demokratisasi China dan Taiwan masa depan adalah factor munculnya civility atau asosiasi asosiasi social. Tetapi Huang memberi catatan kritis bahwa tesis itu dilihatnya misleading: factor pengaruh strktur Negara seharusnya dihitung oleh Weller. "*However, ... misses the view that the power from above is an important factor influencing essential Taiwanese culture. How Confucianism and Taoism have highly related to the power of state. The state has been the invisible hand behind culture*".

Seiring dengan Weller dan Rosenberg, yang melihat faktor penting budaya dalam perkembangan politik di Taiwan, kajian Lim dan Chen (2003) juga melihat munculnya budaya politik demokratis dalam model *consensus conference*: seperti kemampuan argumentasi rasional, saling menghargai, *public spiritedness*, serta orientasi pada mufakat (consensus). Namun tetap kedua pengkaji ini tidak menguak apa yang memungkinkan munculnya kultur politik sedemikian itu.

Kaitan kultur-keagamaan dengan politik demokrasi sedemikian itu kiranya akan amat relevan kita gunakan untuk menjelaskan praktek demokrasi dan pemikiran politik tentang demokrasi yang pada masa akhir akhir ini berkembang di Taiwan dan Venezuela—dua model demokratisasi yang dijadikan kasus dalam kajian ini. Demokratisasi di Taiwan melibatkan reformasi keagamaan (Buddha, Tao, dll) dalam konteks kebudayaan Asia, khususnya Cino-culture; demokrasi partisipatif masa kepresidenan Hugo Chavez (1999—2012) di Venezuela dalam konteks Amerika Latin yang pernah diterpa doktrin agama pro-miskin dalam masyarakat Kristiani, Teologi Pembebasan.

Deliberative Democracy

Meski teori demokrasi deliberative di sini tidak dikaitkan langsung secara konsep teoretis antara kultur masyarakat dengan teori demokrasi, namun teori deliberative democracy yang akan dipaparkan di sini berkait secara praktis dengan kultur masyarakat—sebagai perwujudan model berdemokrasi yang berbeda dengan demokrasi dalam kerangka teori demokrasi liberal. Konsep teoretis demokrasi dileberative (sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal). Konsep-konsep teoretis tentang apa yang

dinamakan “demokrasi deliberative” pada intinya adalah suatu semangat untuk membicarakan urusan publik dengan cara-cara yang baik dengan tidak terlampau didorong oleh kehendak menang demi kelompoknya dan fokusnya pada “apa yang dibicarakan” bukan “siapa yang bicara”. Dalam hal ini, beberapa penjelasan kiranya perlu dipaparkan. Fishkin (2011) dalam tulisannya, “Deliberative Democracy and Constitutions”, mendefinisikannya sebagai, “*the combination of political equality and deliberation, and situates this form of democracy in the context to a range of alternatives*” Ciri deliberative democracy dari demokrasi Dharma ditunjukkan Lin (2009) sebagai bentuk *concensus conference* yang disponsori pemerintah, yang merupakan model Taiwan dalam partisipasi warga (walaupun kajian “bagian luar” dari kehidupan politik tidak menelusuri “sisi dalam” yang memunculkan model itu). Dalam kaitan dengan relasi society—state, Farrelly dari Queens University, Kanada, memberi kita penjelasan konsep teoretis dari Zurn tentang deliberative democracy, bahwa menurut penjelasan Zurn (dalam Farrelly, 2009) demokrasi deliberative menganut posisi pentingnya suatu *reasons-responsiveness* dari Negara: dengan membuat kontras atas model demokrasi liberal dengan demokrasi deliberative, Farrelly menjelaskan bahwa :

“Rather than reducing legitimacy to the aggregation of individual’s preferences, del democrats insist that state action be responsive to good reasons. As Zurn puts it, the notions of ‘reasons-responsiveness’ (..) is at the core of deliberative conceptions. Zurn believes that Jurgen Habermas’s account of deliberative democratic constitutionalism is the most promising normative account of the co-constitutive character of constitutionalism and democracy”

Kemampuan untuk secara jernih membahas urusan social politik secara sabar dan secara mendalam membawa ke persoalan apakah berbagai segmen masyarakat berada dalam taraf itu? Dari temuan lapangan seorang peneliti dari Univ California, Rosenberg (2005) bahwa hanya sedikit orang berkemampuan seperti itu, dapatlah di sini dicatat bahwa agaknya diperlukan tahap tahap perkembangan tertentu atau proses transformasi dari taraf kemampuan “rendah” menuju taraf lebih tinggi agar memiliki kualifikasi melakukan *deliberative democracy*—dan bahwa di Taiwan masa kini, proses itu boleh jadi memang sudah dilampaui. Rosenberg menulis, “*In a manner consistent with the majority of research in social and developmental psychology, my research suggests that only a small minority of individuals*

demonstrates deliberative rationality, that is the requisite capacity to reflect on their preferences and organize them with regard to higher order goals or over-arching life-plans” (p. 221) Rosenberg memberi kita pemahaman tentang asumsi dasar deliberative democracy, yakni tentang seberapa berkualitas wacana yang diproses dalam suatu musyawarah (*the nature of qualities of deliberative discourse*); juga dengan asumsi itu, diajukannya pertanyaan apakah memang secara faktual orang atau masyarakat luas memiliki syarat kemampuan untuk ambil bagian dalam suatu pembahasan mendalam “*in the rational, other-oriented, self-reflective, and just manner*” ?

Dalam hubungan ini, Pablo de Greiff (2000) dari State University of New York, Buffalo—dengan mengutip kritik-kritik atas demokrasi liberal oleh Anne Phillips (1996), Amy Gutmann (1983). Richard B Miller (1996)—mendaftar kritik-kritik sebagai berikut: (1) aras komunitas direduksi menjadi wakil-wakil yang terdiri atas *atomized individuals*; (2) demokrasi yang mengandalkan perwakilan dengan akibat apatisme warga; (3) bermasalah karena tidak mampu menangani masalah perbedaan seperti gender, ras, dan kultur.

Epistemologi sains Barat modern dikatakan sebagai monokultur—bahwa hanya Baratlah satu-satunya sumber kebenaran ilmiah. Perang pada dataran epistemologi juga berlangsung pada tahap perkembangan teori tentang pembangunan politik. Salah satunya adalah tahap ketika pemihakan implisit ilmu sosial terhadap liberalisme. Berdasar ini muncullah tahap pengeskplisitan ideologi—seperti yang dikembangkan sarjana-sarjana kritis seperti pada Teori Ketergantungan dan Teori Marxis pada umumnya, terutama mazhab Frankfurt di Jerman. Pada masa akhir ini, perang epistemologi masih berlangsung: misalnya oleh Ake Claude (1979) dari Afrika. Mengikuti gaya pengiritik liberalisme yang khas, ia menulis buku bahwa ilmu sosial Barat adalah imperialis; “*Social Science as Imperialism: The Theory of Political Development*” Claude menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah menjadi imperialis dengan pengaruhnya ke negara Dunia Ketiga demi kepentingan kaum imperialis.

Konsep teoretis tentang pembangunan politik selama ini juga memperoleh tantangan dengan munculnya wacana kontemporer tentang politik dan agama; dan konsep teoretis tentang teologi politik yang kini muncul kembali. Wacana ini misalnya dikemukakan oleh Kenneth D Wald & Clyde Wilcox (2006), yang menulis artikel dalam *American Political*

Science Review, “Getting Religion: Has Political Science Rediscovered the Faith factor?”. Meski lebih sekedar penelusuran kembali sebab sebab terpinggirkannya isu agama dari dinamika ilmu politik, tulisan itu mencatat akhir abad ke-20, 1980-an, ada minat sarjana untuk melihat kembali kaitan politik dan agama—besar kemungkinan sebagai tanggapan terhadap fenomena sosiologis kebangkitan keagamaan masa kini. Wald dan Wilcox mendapati empat (4) penyebab keterpinggiran agama itu: disiplin ilmu politik yang akar intelektualnya ada di masa sekularisme, latar belakang sosial para ilmuwan politik sendiri yang “jauh dari hidup beragama”, alat ukur yang rumit di bidang agama, dan agenda ilmu politik yang “memburu cepat” untuk mengatasi situasi yang berkembang.

Beberapa konsep teoretis berikut ini akan digunakan dalam kajian ini. *Pertama*, konsep “budaya” dan asumsi dalam teori sosiologi. Di masa lampau, sains Barat “menghapus” teologi (ilmu ketuhanan dan keyakinan agama), dan lalu digantikan dengan antropologi (budaya)—dengan ontologi bahwa obyek studi hanyalah yang nyata di alam dunia ini; tak ada wahyu. Ontologi monokultur ini umumnya ditolak oleh komunitas ontologis bangsa-bangsa Timur. Para sarjana antropologi hasil disain ini membatasi gejala agama sebagai kenyataan sosiologis semata, tanpa dikaitkan dengan eksistensi pewayhuan (revelation)—atau, jika pun ada kebenaran wahyu maka hal itu dipahami sebagai sebatas mitos belaka.

Dalam disiplin ilmu politik, ada konsep budaya politik dari para sarjana seperti Rossenbaum, David E.Apter, Sydney Verba dan S.P. Huntington. Pengertian atau konsep “budaya” kini dikandung juga agama sebagaimana dikonseptualisasikan sarjana-sarjana seperti Thomas Meyer (2005), Cantwell Smith (dalam Zamharir, 2004) dan Iskandar Alisjahbana (2006; 88-111). Konsep budaya *holistik* dari Iskandar Alisjahbana mempunyai pengertian bahwa budaya berisi semua aspek aktivitas manusia, termasuk dalam berbudaya iptek. Tahun 1950-an dikenal sebagai masa ketika teori modernisasi membuat “demarkasi” antara “nilai-nilai modern” dan “nilai nilai tradisi”—dengan adopsi konseptualisasi ke dalam teori pembangunan politik, yang antara lain dikehendaki bahwa kepolitikan “modern” memiliki domain yang otonom yang tidak ada keterikatan dengan nilai agama. (Buku klasiknya adalah karya Daniel L. Lerner, *The Passing of Traditional Societies: Modernizing the Middle East*). Semua yang berasal dari tradisi dipandang kolot dan harus ditinggalkan. Itulah sebabnya di masa itu, ada adagium bahwa agama merupakan penghambat bagi pembangunan. (*religion is an obstacle to development*) Teori modernisasi

di atas lalu direvisi dengan diputusnya garis demarkasi oleh kaum revisionis dalam teori modernisasi. Dari revisi ini maka terbuka pemahaman baru bahwa ada juga unsur unsur modernitas dalam ide ide yang berasal dari tradisi (termasuk agama). Russel Dalton (2004) dalam daftar buku/makalah untuk bahan kuliahnya, *Political Culture and Democracy*, juga mencatat dua (2) hal: *Pertama* signifikannya pengaruh budaya dalam terbentuknya demokrasi di suatu negara dan, *kedua*, tidak terpisahkannya topik budaya (politik) dengan pembahasan tentang peradaban (*civilization*). Beberapa buku/makalah rujukannya *Authority Orientations and Political Values in East Asia: A test of the 'Asian Values' hypothesis* (karya Dalton dan Ong tahun 2003); *Value Change and Democratic Reform in Japan and Korea* (karya Flanagan dan Lee, tahun 2000); dan *Islam and Democracy in the Middle East: the impact of religious orientations on attitudes towards democracy in the Middle East* (karya Tessler, tahun 2002). Dari karya-karya di atas ada pertanda kuat diputusnya garis demarkasi “budaya” dan “agama”. Maksudnya bukanlah sinkretisme agama dengan budaya; tapi bahwa doktrin dan pandangan-dunia yang diajarkan wahyu sudah dipraktekkan secara sosiologis—karena itu, adat kebiasaan setempat sudah diwarnai oleh (terutama) agama besar—dalam istilah Cantwell Smith disebut kumulatif tradisi, dalam konsep Meyer budaya yang sudah dipengaruhi agama besar. (Jika kita adopsi pengertian ini, maka generasi “tua” di Indonesia yang masih suka membuat garis batas “agama” dan “budaya” nampaknya mesti berpikir dua kali karena konsep pemisahan itu sekedar buatan karya filsafat ilmu masa lampau. Termasuk teori hukum lama tentang supremasi hukum yang mengambil bahan-bahan hukum dari adat kebiasaan saja.

Konsep kaum revisionis tentang modernisasi tahun 1960-an kiranya dapat digunakan di sini bahwa ada tumpang tindih tentang unsur modern dan unsur tradisional; nilai modern dapat saja ditemukan pada adat tradisional. Meski tidak secara langsung dikatakan, seorang ilmuwan politik, Yuwono Sudarsono pernah meminta agar masalah SARA sebaiknya secara terbuka ditangani dalam rangka pembangunan politik di Indonesia, bukannya ditutupi (Sudarsono, 1976;. 74-90). Pada masa kini, membatasi secara kaku kapling sekuler di satu dimensi dengan kapling agama agaknya tak berlaku lagi. Banyak orang kini sudah mengambil dan menerima munculnya gagasan dan lembaga yang mengandung sumber campuran —politik, agama dan budaya.

Pengertian “budaya” tersebut berbeda dengan yang ditawarkan ontologi sekularisme, yang memisahkan antara budaya dan agama. Daniel Bell misalnya tidak memasukkan agama dalam kategori polity, budaya dan tekno-ekonomi; sementara Huntington—sewaktu menggunakan kata peradaban—secara implisit memasukkan budaya dan agama di dalamnya. Dalam makalah ini kategorisasi Bell tidaklah digunakan. Bell (dalam Sindhunata 1083; 8) mengartikan tentang polity dan budaya sbb.: polity adalah “*an area which makes exerted efforts of social justice and equality for all, by way of justified political actions – in which rationality is not required.*” Sedangkan “budaya atau kultur “ *is an area of symbols whereby people think of their existence in an imaginary way*”.

Berbeda dengan lainnya yang melihat kuatnya kaitan antara modernisasi ekonomi dengan pembangunan politik, Huntington melihat faktor struktur politik berpengaruh kuat terhadap hasil pembangunan politik suatu negeri. Pertanyaannya di sini adalah apa saja sumber terbentuknya struktur politik ? Rossenbaum menjawabnya dengan budaya politik: budaya politik suatu negeri membentuk struktur politik. Bagi Rosenbaum, budaya politik dulu disebut ideology politik., atau disebut watak bangsa, atau juga psikologi. Budaya politik dapat berubah, yakni dengan faktor pengaruh yang terdiri dari (1) sosialisasi politik, baik lembaga atau pranata sosialisasinya maupun materi sosialisasi; (2) pengalaman sejarah bangsa yang bersangkutan; (3) variable sosio-ekonomi; serta (4) variable politik —antara lain pemerintahan dan partai politik.

C. Metode Penelitian

Studi ini pada tingkat deskripsi adalah studi eksploratif, dengan penelusuran pemikiran dan praktek politik teokrasi dharma di Taiwan masa akhir ini dan demokrasi partisipatif di Venezuela. Kemudian pada tingkat interpretasi, studi ini melibatkan analisis komparatif dengan memanfaatkan teori tentang demokrasi dan kultur masyarakat dan teori tentang transisi menuju demokrasi. Sebagai kajian tentang praktek politik demokrasi dan pemikiran politik, studi ini memanfaatkan pendekatan sejarah dalam kajian pemikiran politik sebagaimana dikonsepskan oleh George H Sabine (SP Varma; 1987). Mazhab teori ilmu politik yang digunakana adalah mazhab relativist, yang menerima aksioma bahwa kebenaran ilmiah bersifat kontekstual.

Ruang lingkup obyek kajian adalah dua dimensi utama kajian, yakni dimensi *procedural* dan nilai-nilai politik atau substansi. Pada dimensi *procedural*, akan dilihat bagaimana masing masing model memiliki mekanisme dalam proses politik demokrasi; nilai-nilai politik demokratisnya akan dilihat elemen-elemen ideologis, *cultural* dan agama yang dikandung oleh demokrasi dharma maupun demokrasi partisipatif.

D. Kasus 1: Demokrasi Partisipatif (Venezuela)

1. Setting Politik

Venezuela adalah negeri dengan penghasil minyak nomor 4 terbesar di dunia; sementara pada masa masa 1980-an dan 1990-an, kemiskinan berkisar 70 % penduduk. Dalam catatan Quirk (2007), tahun 2005, tercatat penduduk Venezuela berjumlah 26,6 juta jiwa dan merupakan negeri dengan mayoritas penduduk Katolik—namun di masa perubahan budaya dan politik masa Revolusi Bolivarian ini, menurut laporan Orozco (2004) sebanyak 15 % berpindah ke Evangelican:

“By attending to material as well as spiritual needs, Pentecostalism holds out hope to the disperate poor around the developing world similar to the way Islam attracts people in Asia and the Middle East. Disillusioned with Catholicism, large segments of Venezuelan poor are turning to Evangelicalism’s offer of community, help, and hope for a better life”.

(www.religion.info/english/articles/article_121.shtml).

Laporan ini juga merujuk pada pernyataan suatu konferensi para Bisop Katolik se Amerika Latin bahwa beberapa tahun silam, sebanyak 8000 orang (Katolik) Amerika Latin (bukan saja di Venezuela) pindah ke Evangelican dalam waktu setiap harinya. Tahun 2005 pendapatan per kapita adalah sebesar US \$4,020, menurut Bank Dunia. Selanjutnya, Quirk juga melaporkan bahwa *oil boom* tahun 1970-an telah memakmurkan kelas menengah, “namun sesudah itu terjadi keruntuhan harga minyak dunia yang menghukum kelas ini menjadi miskin, ketika (situasi ini) mengikis standar kehidupan yang sudah termiskinkan. Pengangguran tetap tinggi dan, menurut gambaran resmi, sekitar 60 % rumah tangga berada dalam garis kemiskinan” (Quirk, dkk, 2007; 168)

Apabila kita telusuri terkait dengan kebijakan ekonomi politik yang membuka investasi asing adalah masa akhir 1800-an, dengan “membangun infrastruktur serta mengembangkan pertanian dan pendidikan”. Sementara itu

dalam hal politik kekuasaan, pengalaman pemerintahan demokratis dialami Venezuela sekitar 10 tahun (1947-58) yang kemudian “terguling dalam delapan bulan kudeta militer yang dipimpin oleh Marcos Perez Jumenez yang membentuk pemerintahan dengan mendapat dukungan dari angkatan bersenjata dan Amerika Serikat”. Pengalaman politik demokratis kembali dialami tahun 1958, ketika Marcos diusir oleh seorang laksamana, yang diikuti oleh kemenangan seorang anggota sayap kiri dari Partai Aksi Demokratis, sebagai presiden yang dipilih secara demokratis (Quirck, dkk., 2007;173-4)

Dalam periode masa belakangan ini, sebelum Chavez berkuasa, situasi Venezuela ditulis Cabrera sebagai negeri “yang penuh korupsi, manipulasi dan nepotisme. Jurang antara kaya dan miskin luar biasa. Penghasilan minyak bumi hanya dinikmati sekelompok kecil elit, serta sama sekali tidak membawa perubahan positif atas ekonomi nasional” Tahun 1989 terpilih Carlos Andreas Perez sebagai Presiden negara ini. Program-program ekonominya adalah ekonomi neolib: tak ada subsidi bagi sektor publik, privatisasi, dll. Dampak negatifnya dalam satu tahun antara lain ialah bahwa ekonomi mengalami krisis dengan kontraksi atas GDP sebesar 8,6 %; Gejala sosial bermunculan.

Akhir 1970-an, ada dinamika reformasi di tubuh angkatan bersenjata di Venezuela. Gerakan-gerakan ini memunculkan perwira muda Hugo Chavez yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan tahun 1992, walaupun gagal tetapi memiliki dampak positif. Tokoh Chavez kemudian menjadi makin populer di mata masyarakat. Dalam satu perspektif, latar sosiologis Chavez dilihat sebagai tokoh yang muncul dari “kaum pinggiran”, bukan dari elit dan partai politik dominan. (Meski posisi pinggir Chavez bukanlah dalam kategori budaya, namun kalau dalam perbincangan tentang sub-kultur di Indonesia, maka dalam kebudayaan Jawa, dikenal “budaya orang Solo dan orang Jogja” sebagai “pusat” sementara sub-kultur “pinggiran”, misalnya terdapat di antara orang Pekalongan dan Tegal). Sebelum masa Chavez memberontak, kondisi sulit di bidang ekonomi dan berdampak pada politik dihadapi Venezuela. Dimulai harga minyak yang turun pada 1983 sampai 1984 berdampak pada kebijakan hemat dalam pengeluaran Negara dan politik kesejahteraan; terpilihnya Carlos Andrez Perez sebagai presiden tahun 1989 adalah seiring dengan depresi ekonomi dengan implikasi de-stabilisasi politik seperti pemberontakan “yang membuat

sekitar 300 sampai 2000 orang terbunuh, terperosok dalam keadaan perang dan serangan umum” (Lebowitz, 2007; 174-5).

Istilah revolusi Bolivarian dikaitkan dengan tokoh penting Simon Bolivar, yang pada awal abad ke-19 berhasil membebaskan lima (5) Negara Amerika Latin dari penjajah Eropa, Spanyol. Bolivar adalah seorang “jenderal biasa” yang bercita-cita memerdekakan Amerika Latin dari penjajah. Bolivar lalu diidolakan oleh Chavez. Revolusi Bolivarian digunakan gerakan dengan tokoh sentral Hugo Chavez ini sebagai nama bagi upaya mereka berjuang menggulingkan kekuasaan yang menerapkan ekonomi kapitalisme dan ide ide liberalisme ekonomi. Ada masa masa sesudah kegagalan kudeta itu dan setelah ia dibebaskan, Chavez melakukan kunjungan kunjungan ke berbagai daerah untuk mengetahui tanggapan warga tentang dirinya dan mendapati kenyataan bahwa begitu luas dukungan warga jika Chavez mencalonkan diri menjadi prsedien.

2. Eksperimen Demokrasi Partisipatif

Pada pemilu 1998, Chavez memenangkan pemilu, melalui partainya MVR (Movimiento V Republica). Tentang kemenangannya ini, seorang pengamat dan pengkritik tajam, Teodor Petkoff, dilihatnya sebagai akibat krisis ekonomi parah masa itu; “Akibat krisis sosial dan ekonomi ini, terciptalah krisis politik, di mana terjadi semacam kekosongan kekuasaan”. Boleh jadi, apa yang dimaksud Petkoff adalah bahwa, ketika ada peluang untuk berkuasa, yang sudah menciptakan peluang dan siap adalah Chavez, melalui investasi- investasi politiknya dimasa sebelumnya.

Pada tahun 2002 atau setelah tiga (3) tahun Chavez berkuasa, terjadi percobaan kudeta atas Chavez yang dimotori PEDECAMARAN—asosiasi pengusaha nasional, dipimpin Pedro Camone. Kudeta berlangsung 48 jam atau dua hari dan Chavez disingkirkan. Namun titik balik terjadi, ketika ribuan massa mengepung istana dan menuntut dikembalikannya Chavez ke kursi kepresidenan. Drama kudeta berakhir, Chavez kembali berkuasa. BBC News dalam hal ini menuliskan berita bahwa kudeta yang gagal ini terjadi ketika Chavez menasionalisasi perusahaan minyak terbesar kelima (milik swasta Venezuela). Ditulis bahwa Chavez *“was pushed from office on 12 April-as a result of his attempts to take control of the world’s fifth-largest oil industry. But just two days later, after his supporters mainly Venezuelan’s poor took the streets, he was back in the presidential palace.”*

Menurut berita Kompas, tahun 2010 ini, Chavez memperingati terbebasnya negeri dari penjajah 200 tahun lalu, dengan berikrar akan memimpin 11 tahun lagi. Chavez akan membersihkan Venezuela dari 100 tahun dikuasai kelompok kecil Amerika. Dikatakan bahwa Revolusi Bolivarian (RB) berada di Venezuela untuk memerintah selama 900 tahun. Menurut Lebowitz, kekuasaan Chavez dengan Sosialisme Abad ke-21 dibagi ke dalam tiga fase: Fase ke-1 (1999 – 2006; Fase ke-2 2007 – 2009; dan Fase ke-3 2010 – 2019. Dalam Fase Awal revolusi, Lebowitz mencatat kekuatan revolusioner utama belumlah terdiri dari kaum pekerja, “sebagian besar dari pendukung kuat RB ialah kaum miskin (dan terutama kaum wanita.”.; sementara itu, elemen pekerja yang terorganisir “kurang begitu berperan sebagai aktor dalam revolusi”.

Tentang segmen perempuan, studi sosial politik agaknya kurang berhasil memotret peranan signifikan mereka. Yang cukup memberi data tentang perempuan antara lain lain studi budaya dari Rakowski (2003). Ia menyajikan fakta fakta yang pada intinya menyebut bahwa jauh sebelum Chavez berkuasa, memang berbagai elemen (organisasi) perempuan terus bangkit memperjuangkan nasibnya dan mengambil peran penting dalam proses sosial politik di Venezuela: misalnya data bahwa tahun 1970-an sampai 1990-an, hanya sekitar 25 % perempuan aktif bekerja, sedangkan menjelang 1999—satu tahun sebelum Chavez berkuasa—meningkat menjadi 50% (dengan 63 % mahasiswa hukum adalah perempuan di tahun 1998). Aktivisme perempuan Venezuela ini mencakup (1) dibangunnya koalisi perempuan, sejak 1970-an; (2) kampanye reformasi kode etik sektor publik dari 1979 sampai 1982—dengan segmen segmen ideologis dominan dari unsur sosialis dan komunis; (3) awal 1980-an dibentuknya jaringan LSM perempuan berskala besar; (3) Akhir 1980-an, sebagai respon positif Presiden Luciandi, dibentuknya komite reformasi politik tingkat nasional, yang anggotanya dari banyak macam delegasi organisasi perempuan , yang misi utamanya adalah “*to consult with citizen groups and craft the decentralization program*”. (Rakowski, 2003; 393). Atas dasar modal sosial inilah di masa Chavez perkembangannya antara lain diangkatnya lebih banyak perempuan dalam Kabinet Chavez dan dalam pos-pos penting lain di luar kabinet. Transformasi di kalangan perempuan sudah berlangsung 20 tahun.

Kekuatan revolusioner pada tahap kemudian mencakup kaum pekerja; namun masih dalam keadaan terfragmentasi, melalui terpecahnya serikat

pekerja yang mapan, CTV. Tahap ini dapatlah disebut tahap transisi atau anomali. Polarisasi ini berproses ketika kekuasaan Chavez tengah menghadapi upaya penggulingan oleh pendukung ekonomi pro pasar yang dilakukan terutama pelaku pelaku bisnis besar. Artinya elemen revolusioner dari kekuatan buruh baru muncul ”ketika berlangsung aksi para bos pada tahun 2002-3, (ketika) gerakan penentangan tersebut mengkristal dalam bentuk gerakan memisahkan secara tegas dari sikap CTV yang mendukung para majikan”.

Dari kekuatan pekerja yang masih terfragmentasi ini, perkembangan lanjutnya adalah tahap bersatunya kaum pekerja ini di April 2003, berupa pembentukan federasi kaum pekerja yang pro Chavez. “kongres pertama pada awal Agustus dihadiri lebih dari 1,300 partisipan yang tercatat mewakili lebih dari 120 serikat buruh dan 25 federasi regional”. Tahap ini boleh disebut sebagai tahap konsolidasi. Konsolidasi kekuatan kaum pekerja ini berlanjut dengan berlangsungnya rapat rapat solidaritas selama April 2004; April 2005 berlangsung panel buruh dalam rapat rapat solidaritas, “saat membicarakan pengambilalihan Venepal (perusahaan kertas) ”. Semua perkembangan ini tentu saja didorong oleh amanat konstitusi tentang keharusan pengelolaan bersama dan swa –kelola aktivitas ekonomi yang juga dikuatkan oleh penegasan Chavez dalam pidato pidatonya. Tentang kekuatan-kekuatan revolusioner ini, Hellinger dan Ellner (2004), yang melakukan studi sekitar upaya kudeta terhadap Chavez, seperti ditulis Rosen— (<http://proquest.umi.com/pqdweb>) menyebut tiga elemen, yaitu pergerakan kaum pekerja, para manajer, yang diawali para manajer BUMN Migas dan sebagian tentara pro-Chavez. Penyebutan tiga (3) kelompok kekuatan oleh Hellinger dan Ellner di atas agaknya berbeda dengan yang digambarkan Lebowitz: Lebowitz lebih melihat evolusi yang agak lamban pada kekuatan kaum pekerja. Jika kita pahami paparan Lebowitz, maka akan nampak sekali bahwa RB ini memiliki modal sosial yang luas di basis massa—yang lebih berbasis pada kesadaran kultural dan sejarah mereka sendiri, bukan berbasis pada ideologi besar yang dianut para aktivis politik. Yakni kekuatan tingginya ekspektasi berbagai kaum miskin terhadap kekuasaan Chavez—yang kekuatannya melampaui aktivis aktivis ideologis sekuler.

Meski sudah berada pada tahap konsolidasi di segmen kaum pekerja, dan (menurut Hellinger) para manajer BUMN, namun—senada juga dengan kontroversi para ideolog revolusi—datanglah masa masa ketika ada semacam stagnasi revolusi—apakah akan terus membawa hasil, apakah jalan ekonomi

politik yang ditempuh sesuai arah? Lebowitz menulis bahwa “sepuluh bulan kemudian (pada saat karya Lebowitz ditulis), euphoria revolusi tersebut nampaknya mengalami kemacetan. Komite-komite pemandu di PDVSA efektifnya tak lagi ada, muncul masalah pelik di CADAPE (semacam PLN yang dikelola secara koperasi—HZ) mengenai apakah yang dijalankan di sana merupakan pengelolaan bersama ataukah sesuatu yang semu saja, dan meski UNT (Serikat Buruh Nasional pro Chavez—HZ), menyerukan delapan ratus perusahaan yang telah ditutup harus diambil alih (dan ditambah lagi dengan dukungan tokoh tokoh pemerintah bahwa prakarsa tersebut harus dijalankan oleh para buruh), namun hanya beberapa perusahaan swasta yang bisa mengikuti jejak Venepal (Invepal)”—perusahaan kertas yang pertama dikelola kaum pekerja pro-Chavez) Kebimbangan jalan revolusi ini dicatat oleh Lebowitz sebagai pengaruh banyak faktor, salah satunya adalah konflik kepentingan kaum pekerja itu sendiri: semangat untuk melakukan revolusi ini berhadapan dengan kurang-terpenuhinya hak- hak pekerja seperti pendapatan yang layak dan kesejahteraan.

Dalam saat saat genting sedemikian itu, adalah menarik bahwa kepemimpinan yang efektif lalu bekerja. Lebowitz mencatat bahwa Chavez “turun langsung” mengatasi persoalan serius ini: “Chavez mendiskusikan tuntutan tuntutan buruh yang terorganisir”

3. Karakteristik Demokrasi Partisipatif & Sosialisme Baru

Dalam hal kedaulatan di tangan rakyat, di desa dibentuk dewan komunal beranggota sekitar 20 orang; di kota dibentuk dewan kota dengan 200 sampai 400 anggota. Fehrer (2008) dalam kajian tentang model demokrasi di masa Chavez menulis seringnya para pengelola komunitas terdengar berbicara bahwa demokrasi partisipatif ini “*transforming Venezuela into a ‘participatory’ democracy, rather than a ‘representative’ democracy. The communal councils provide a structure for direct democratic participation*”. Fehrer juga menggambarkan suatu demokrasi partisipatif bertumpu pada dewan dewan komunal, yang berbeda dengan model liberal: perbedaan itu adalah adanya kesadaran untuk peduli dengan lingkungan komunitasnya. Dewan komunal ini makin memiliki kekuatan hukum dengan diundangkannya UU Dewan Komunal dalam bulan April 2006. Di sini para ahli teori mungkin akan melihat kembali konsep lama tentang demos di kota-kota kecil (polis) jaman Yunani kuno yang kini dikembangkan secara kreatif gaya demokrasi langsung Chavez; pengembangan itu mencakup

digugurkannya mitos tentang demokrasi perwakilan sebagai satu satunya cara mengelola sistem politik demokrasi yang jumlah penduduknya besar. Dalam hubungan dengan keberadaan dewan komunal, dibentuk koperasi- koperasi, sebagai hasil kemenangan Chavez dalam referendum Nopember 2006 yang memuluskan jalan kebijakan politik kemakmuran rakyat melalui amanat konstitusi bahwa ekonomi Venezuela dibuka untuk usaha-usaha kecil terutama koperasi, dengan dukungan pemerintah daerah yang harus transparan, serta dibentuknya lembaga finansial bagi mereka. Studi kasus oleh Harnecker (2007) tentang koperasi dan demokrasi di tempat-kerja menyajikan fakta kuatnya motivasi kebanyakan anggota koperasi yang dikaji, betapapun pendapatan mereka di sana kecil: data menyebutkan bahwa 47.3 % menyatakan tak mau pindah bekerja di perusahaan walaupun gajinya lebih besar dibanding pendapatan mereka di koperasi itu. Temuan Harnecker menyebutkan bahwa makin baik kualitas demokrasi di tempat-kerja, maka makin kuat kesadaran kolektif para anggotanya. Adapun kelemahan yang ada pada koperasi yang dijadikan kasus adalah kurangnya pengalaman sebagian anggota dalam hal pekerjaan administrasi dan kurang terlatih dalam ketrampilan sosial.

Di tempat kerja atau korporasi, dibentuk pengelolaan perusahaan secara kolektif oleh para pekerja. Untuk yang disebut terakhir, tantangannya lebih kompleks atau rumit: tetap ada resistensi di antara birokrat pro-Chavez apakah cara ini efektif. Catatan Lebowitz kiranya cukup mengindikasikan hal ini: “Di antara para pejabat Negara yang ada dan aparat partai Chavez, muncul penolakan tertentu terhadap peralihan kekuasaan ke arah bawah karena hal itu akan mengurangi kekuasaan untuk membagi-bagikan pekerjaan dan imbalan dari atas (dan hal itu akan mempengaruhi bentuk bentuk pemilihan dan korupsi yang telah mentradisi)” (Lebowitz, 2007; 226).

Beberapa pembangunan sosial selama Chavez berkuasa. *Pertama*, dalam waktu enam (6) bulan, dicanangkan kampanye bahwa satu juta (1.000.000) orang di desa-desa Venezuela harus bebas buta huruf. *Kedua*, pelayanan kesehatan murah dan mudah diakses bagi rakyat. Sebanyak 30.000 dokter dengan bayaran sama dengan upah buruh didatangkan dari Kuba dengan tugas melayani 200 keluarga miskin tiap satu dokter. Operasi mata gratis bagi ratusan ribu warga secara gratis. Ribuan beasiswa bagi anak putus sekolah. Pendirian 3000 sekolah baru, sekolah gratis bagi 1.500.000 warga. Bagi si miskin didirikan Universitas Simon Bolivar, dengan buku teks gratis, transportasi ke universitas gratis, makan gratis—pendidikan yang semula

dianggap hanya bagi si kaya. Kurikulum dirancang bersama staf universitas dan mahasiswa. (Soyomukti, 2007; 123). Juga dibuka pasar makanan rakyat dengan harga 30 % di bawah harga pasar.

Di segi pelebagaan program ekonomi, gerakan Chavez juga diatur melalui ALBA atau Lingkaran Bolivarian (Bolivarian Circle)—merupakan gerakan massa. Lagi-lagi, ini diinspirasi oleh semangat anti-imperialisme Bolivar. Jargon-jargon utama lingkaran ini adalah perjuangan rakyat dan anti borjuasi. Gerakan Chavismo ini amat mementingkan kedaulatan rakyat, anti Amerika Serikat, dan pelibatan rakyat dalam pemerintahan. Yang terutama tentu saja diundangkan konstitusi baru. Undang undang baru dibuat, UU Bolivarian, yang mengatur hak hak dasar rakyat dan jaminan demokrasi partisipatoris. Juga disebut pasal tentang hak hak rakyat atas tanah melalui distribusi secara adil. Kebijakan dasar rezim Chavez adalah realokasi sumber sumber ekonomi yang semula di tangan pengusaha demi kelompoknya kini beralih dari rakyat untuk rakyat. Konsep realokasi dapat dirujuk ke konsep sistem dalam ilmu politik bahwa suatu sistem politik adalah pengalokasian otoritatif atas sumber sumberdaya yang kurang lebih absah (*authoritative allocation of resources which is more or less legitimate*). Ini mencakup shift dari swastanisasi ke”negara” atau public.

Nasionalisasi perusahaan minyak (dari swasta ke Negara) di Venezuela—di satu sisi adalah hasil revolusi ideologis Chavez—namun di sisi lain mungkin berkoinidensi dengan tren global keperluan semacam nasionalisasi. Hal ini diamati antara lain oleh Amaral (2008), yang melihat dinamika ekonomi minyak global dan keperluan untuk memeluk kebijakan nasionalisasi. Amaral (2008) menulis “ *The nationalization of oil and gas supplies has been going on for many decades and includes countries such as Iran, Saudi Arabia, Ecuador, Venezuela, Russia, Mexico, and Bolivia.*” Selanjutnya Amaral berpikir bahwa “ *It seems that if oil is so important and so rare, as they tell us, we should have a better control of our own national reserves when we take in consideration that oil is a strategic and economic asset.*”(Tentang konsep barang strategis, tahun 2008 di UI diingatkan dalam seminar bahwa di Indoensia nampaknya kurang serius mengadopsi konsep minyak sebagai komoditas strategis; lebih diperlakukan barang ekonomi belaka).

Perusahaan minyak swasta PDVSA dialihkan pengelolaannya kepada UNT (Union Nacional de los Trabajadores)—merupakan organisasi buruh. Melalui skema di atas sebanyak 60 % kepemilikan asset minyak dan gas kini

ada di tangan BUMN minyak dan gas PDVSA. Tahun 2008, peningkatan ekspor minyak mentah ke China berlangsung, yakni sebanyak 350.000 barrel/hari. Dengan demikian Venezuela mengurangi ekspor minyak ke AS yakni menjadi 8,2 %. Seiring dengan kepentingan vital di dalam negeri dan regionalisme, Chavez juga bersama kepala kepala Negara lain di Amerika Latin membentuk konsorsium minyak PetroCaribe.

Investasi juga didorong masuk ke sektor otomotif, melalui usaha usaha patungan. Misalnya tahun 2007 didirikan pabrik mobil bekerjasama dengan Iran, dengan 51 % dikuasai Iran dan 49 %, Venezuela. Rencananya sebanyak 5000 unit mobil akan diproduksi di tahun 2009 dan 2010 sebanyak 35 % suku cadang diharapkan berupa *local contents*. Juga di sektor transportasi, tahun 2006 sebanyak tiga (3) jalur kereta api di Caracas (ibu kota) dan sekitarnya akan dibangun; juga konstruksi untuk sarana angkutan metro di beberapa lokasi.

E. Kasus 2 : Demokrasi Dharma Di Taiwan

Tumbuh subur organisasi agama, yang kedudukan mereka tidak berada di oposisi. Program-program karitatif mereka umumnya mendapat tempat di hati masyarakat. Dalam dimensi politik, mainstream gerakan keagamaan di Taiwan masa ini adalah sikap untuk ikut mendorong rekonsiliasi, dan mendukung transisi damai menuju demokrasi.

Suatu tinjauan atau timbangan buku (book review) oleh www.taiwanembassy.org/us/nyc/et.arp?Rp=62&CtNode=3642Xitem=57824 menggambarkan tesis R Madsen tersebut. Penulis itu memberi apresiasi Madsen yang menolak pendekatan orientalisme, yang menghendaki perpindahan kepegangan “budaya timur” ke “budaya barat”. Orientalisme yang ditolak itu digambarkan dalam pernyataannya, *Advocates of wester liberal tradition have long believed that ‘for Asian societies to successfully modernize, they must replace cumfucian way of thinking with western liberal mes.*

Daid A. Palmer (2009) dalam *China Perspectives* menimbang buku Madsen Palmer menulis, “Dharma’s Democracy is a study of how the ‘religions renaissance in Taiwan since the lifting of merial law in 1987 has contributed to the development and stability of Taiwanese democracy. The another, Richard Madsen, offers a rare perspective ofon a revolutionary morality and social transformation in the people’s Republic of China.....and on religion and civil society in tho Chinese worldall of

these works reflect a search for the moral foundations of zivilized social life, and a critique of a purely secular libyeralism which seec society as founded simply on the rational self interest of individual citizens' (I xx iii).

Tumbuh Suburnya, Yayasan Budhisme Tzu Chi, Dharma Drum Mountain, Daoist Enacting Heaven Temple. Tiap kelompok keagamaan yang dikaji Madsen itu memiliki segmen atau kelas social masing-masing.

“Menegenai karya atau tesis Madsen itu, Palmer mencatat “Madsen’s contribution lies in the way he comparares the (religions) groups with the fine eye of a cultural sociologist, and cot consider how they fit into the context of Taiwan’s democratic development, and even the course of world religions history”.

Agama dan Politik Damai : Pembangunan Budaya Politik di Taiwan.

1. Enacting Heaven Temple	Lower-midle class
2. Fo guangsan	Pengusaha, Pejabat, Politisi
3. Tzu Chi Budha	Manajer dan Profesional
4. Fogushan	Cerdik Cendikiawan

Teori empiris : Anti tesis teori politik sekuler. Palmer selanjutnya mencatat bahwa tesis Madsen ini dapat dikatakan berposisi antithesis terhadap teori politik modern barat yang mapan selama ini = ditolak teori sekularisasi politik yang liberal – yang cirinya adalah masyarakat yang dijauhkan dari pandangan dan nilai agama. Palmer juga mencatat bahwa civil society yang ditemukan Madsen di Taiwan bukan civil society yang ada di Barat, yaki yang berhadapan dengan negara.

Sejarah politik dan formasi consensus untuk bertahan dengan mengemas kebudayaan sendiri dengan proses proses politik demokratis. Musyawarah untuk mufakat dengan menerima bond of covility dari nilai agama; musyawarah untuk mufakat adalah soal prosedur dan gaya demokrasi, belum isi atau dimensi covert culture. Tentu saja factor signifikan Dharma didukung oleh beberapa factor pemicu dalam sejarah Taiwan: jadi bilai nilai Dharma bisa jadi lebih sekedar ditemukan kembali apa yang dimiliki bangsa itu, ketika daya-dorong seperti mempertahankan eksistensi Taiwan, persinggungan dengan “budaya modern Barat”, persinggungan dengan praktek demokratis gerakan keagamaan Kristen yang masuk ke Taiwan, sikap akomodasi elit politik Taiwan terhadap “nilai nilai keagamaan tradisinal”

Dengan kata lain, yang menarik bukanlah pada sikap pro atau sikap kontra terhadap tesis Richard Madsen. Banyak kajian tentang politik, termasuk kepolitikan Taiwan, berfokus pada bentuk-bentuk luaran yang diidentifikasi melalui beragam survei opini, dan analisis kualitatif yang mengasumsikan satu atau lebih variabel sebagai penyebab terwujudnya perilaku dan opini politik. Namun masih sedikit kajian yang berfokus untuk lebih mendalami hasil-hasil yang diperoleh oleh pemotretan hal-hal yang manifest. Kajian Madsen boleh dikatakan berhasil melakukan pendalaman sedemikian itu. Kajian Madsen yang lalu menggambarkan bentuk demokrasi non-liberal yang disebutnya *Dharma's democracy* di Taiwan berupaya menguak lebih mendalam atas hal-hal yang manifest dari kehidupan politik. Berbeda dengan survey survey opini, Madsen menelusuri variable dependen dan antecedent—dan salah satu variable menonjol adalah nilai-nilai Dharma dalam konteks sejarah kepolitikan Taiwan dalam kajian antropologis yang menyelami kulit-kulit luar dari realitas politik Taiwan. Mirip dengan para penganut kulturalis dalam kajian social dan politik yang di zaman modern dirintis oleh Max Weber, Madsen menemukan adanya korelasi positif antara kultur agama atau nilai-nilai Dharma dengan perkembangan demokrasi non-liberal di Taiwan masa kini. Dan dalam perspektif konsep teoretis, demokrasi Dharma di Taiwan tergolong ke dalam jenis demokrasi non-liberal yang berada dalam spectrum deliberative democracy.

Relevansi bagi Indonesia antara lain adalah bahwa, meminjam istilah budayawan klasik Indonesia, Umar Kayam, “kultur berembug” yang pernah menjadi budaya kita dahulu selayaknya ditemukan kembali, setelah digerus oleh politik modernisasi yang salah arah selama ini. Dalam uforia liberalisasi politik 1945 – 1949, kultur berembug sudah mulai digerus akibat politik kekuasaan oleh para elit nasional yang “terjerembab” ke dalam ideology ideology modern Barat. Akibatnya, kultur berembug terkikis. Pola yang kemudian diterapkan oleh Soekarno sesudah dikeluarkannya dekrit pttresiden 1949 hingga 1965 secara umum adalah apa yang dikenal dengan “demokrasi Terpimpin”: secara konsep teoretis, demokrasi ini tidak memiliki semangat yang egaliter seperti dikehendaki oleh demokrasi deliberatif. Bahkan kiranya benar sebagian orang menamakan era ini adalah era otoriterianisme, ketimbang sebetulnya demokrasi. Mohammad Hatta, sebenarnya salah satu tokoh yang hendak mengupayakan pendidikan politik yang bertumpu pada kultur berembug itu, namun hal ini tidak secara luas berhasil. Di era Suharto,

“kultur berembug” diorientasikan kepada terjaminnya pembangunan ekonomi dalam kerangka bekerjanya rezim *developmentalis*.

Kultur berembug yang berkembang realtif tidak memiliki *covert culture* seperti yang berkembang di Taiwan masa kini, yakni tidak akomodatif terhadap nilai nilai agama yang dominant, Islam. Karena menyingkirkan nilai agama dominant, maka sebenarnya bukan mencerminkan esensi dari kultur berembug itu sendiri. Di masa reformasi politik yang menghasilkan banyak transfer kekuasaan politik nasional hingga CEO kini, Susilo Bambang Yodhoyono, kultur berembug di Indonesia benar benar mengalami kerusakan maha dahsyat: berbagai pertengkar politik, skandal penyalahgunaan jabatan, dan anomali anomaly lain dalam kerangka system politik demokratis multi partai yang kehilangan jati diri dan etika—semuanya benar benar menjadi indicator rusaknya kultur berembug di Indoensia masa kini.

Kata “berembug” di Indonesia (Jawa) boleh jadi senada dengan konferensi consensus di Taiwan—keduanya adalah semacam musyawarah untuk mufakat—yang tergolong ke dalam klaster demokrasi deliberatif. Jika suatu masa nanti, kultur berembug itu ditemukan kembali, ia dikembangkan lebih lanjut untuk membentuk budaya politik Indonesia dan diharapkan lebih menjamin gerak kepada pembangunan social ekonomi yang demokratis yang menghargai kepribadian kita sendiri. Implikasi politik dari jalan “kembali ke penemuan jati diri” (kultur berembug) ini antara lain adalah penolakan kita terhadap kecenderungan “rendah diri” terhadap khasabah budayanya sendiri, dengan kehendak adopsi barang dari luar yang disebut demokrasi liberal. “kultur berembug” itu, dalam konteks Minangkabau, juga harus dipahami lebih arif—bukan kembali ke masa lampau.

Meski begitu, hal hal ini lebh mudah dikatakan sedangkan pemahaman kita dan tindakan kita untuk perbaikan ini lebih sulit. Prasyaratnya adalah apakah sudah terjadi transformasi dari praktek musyawarah yang berkualitas “rendah” ke pengembangan lebih tinggi ? Kedua, perbaikan juga lebih sulit antara lain karena *mindset* kita belum dapat memahami hal hal demikian kecuali kita “membuka jendela dunia” bahwa ada aneka model modernisasi dan bahwa ruang pilihan adalah terbuka, yakni pilihan yang bertumpu pada penemuan jati diri untuk dikembangkan menuju arah yang benar. Pilihan ini jelas bukan secular-libertarian poitics—satu jenis politik yang seringkali dikedepankan berbagai segmen masyarakat Indonesia ketika menolak adanya keterkaitan faktor keagamaan dalam politik. Kutur

berembug dapat dikembangkan dengan menghilangkan rasa redah diri antara lain dengan menghargai factor signifikan kaitan unsur keagamaan dalam politik sebagaimana yang ada pada Dharma demokrasi di Taiwan.

Dengan kata lain, yang menarik bukanlah pada sikap pro atau sikap kontra terhadap tesis Richard Madsen tersebut; yang menarik adalah bahwa ada eksperimen semacam di Taiwan yang memperlihatkan persinggungan positif antara demokrasi dan kultur masyarakat, termasuk nilai nilai agama.

F. Simpulan

Kajian terkait dengan kaitan kultur-keagamaan yang dikaitkan dengan politik demokrasi di Venezuela dan Taiwan, dimana dalam kajian Taiwan dilihat dari sudut pandang reformasi keagamaan. Dharma's Democracy dalam kajian Madsen menguak lebih dalam manifest kehidupan politik. Adanya korelasi positif antara kultur keagamaan dengan nilai-nilai dharma atau nilai-nilai dhmar dengan perkembangan demokrasi di Taiwan yang coraknya merupakan demokrasi non liberal, dengan masuk katagori spectrum deliberative democracy. Dalam kasus Venezuela dengan pendekatan demokrasi partisipatif dimasa kepresidenan Hugo Chaves, yang sebelumnya masyarakat dalam kondisi miskin, dengan pendekatan partisipatif ala Chaves beberapa keberhasilan pendekatan partisipatif Chaves dengan model pembangunan sosial seperti kampanye bebas buta huruf, pelayanan kesehatan murah bagi masyarakat, penyediaan dokter dengan satu dokter untuk 200 keluarga miskin, adanya pendirian sekolah baru, pendirian universitas baru yang gratis dan bisa di akses oleh masyarakat. Realokasi tanah bagi orang miskin. Adanya nasionalisasi perusahaan minyak dan gas sebagai pengalokasian otoritatif atas sumber sumberdaya yang kurang lebih absah (*authoritative allocation of resources which is more or less legitimate*).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Terjemahan A Rahman Zainuddin, Jakarta: YOI.
- Friedmann, Thomas L. 1999. "Opening Scene: The World Is Ten Years Old", dalam *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*, Updated and Expanded Edition), New York: Farrer Strauss Giroux.
- Lebowitz, Michael A. 2009. *Sosialisme Sekarang Juga*. Penyunting Darmawan. Jakarta: Resist Book.
- Mustafied, Muhammad. 2000. "Merancang Ideologi Gerakan Islam Progresif-Transformatif (Mempertimbangkan Islam Kiri Hassan Hanafi), dalam Mihidin M. Dahlan, ed., *Sosialisme Religius: Suatu Jalan Keempat?*, Yogya: Kreasi Wacana.
- Quirck, Robert E, dkk. 2007, *Poros Setan: Kisah Empat Presiden Revolusioner*. Penerjemah Abdul Qadir Shalah. Yogya: PRISMASOPHIE.
- Soyomukti, Nurani. 2007. *Hugo Chavez dan Politik Radikal*. Yogya: Resist Book.
- Thompson, John B (2004), *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*, Terjemahan Haqqul Yaqin, Jakarta: IRCiSod.
- Tillich, Paul. 2002. *Teologi Kebudayaan: Tendensi, Aplikasi dan Komparasi*, Penerjemah Miming Muhaimin. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Wahid, Abdurrahman. 1993. "Hassan Hanafi dan Eksperimentasinya" dalam SHIMOGAKI, Kazou. *Islam Kiri: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi*, Pengantar Abdurrahman Wahid, Yogya: LKIS.

Sumber Jurnal:

- Bello, Walden. 2003. "Revolusi Dan Kontra Revolusi di Venezuela", dalam *Jurnal Keadilan Global*, Vol 1 (1), hlm. 45-50.
- Chang, Peter. 2011. "Confucian China and Jeffersonian America: Beyond Liberal Democracy" dalam "Abstract" (*Asian Studies Review*. March 2011 Vol 35 (1).
- "Deliberative Democracy and group representations" dalam *Social Theory and Practice*. Fall 2000 Vol 26 (3). Proquest Sociology.
- Fishkin, James S. 2011 "Deliberative Democracy and Constitutions" dalam Publication Abstract (*Social Philosophy and Policy*. Oxford. Jan 2011 Vol 28 (1)
- Farrelly, Collin. 2009. "The Deliberative Democracy and the Institution of Judicial Rev in Social Theory and Practice", (*Proquest Sociology*. Apr 2009 Vol 35 No. 2), dalam "Book Review", Christopher F Zurn, *Deliberative Democracy and the Institutions of Jud Review*. New York: Cambridge Univ Press, 2007)
- Fehrer, Kendra. 2008. "Reconfiguring Democracy: Ven 's New Communal Councils Confront Bureaucracy" dalam *Peacework*, Dec 2007/Jan 2008, Vol 34. (Abstract)
- Harnecker, Camila Pineiro. 2007."Workplace Democracy and Collective Consciousness: An Empirical Study of Venezuelan Cooperatives", dalam *Monthly Recie*. New York, November 2007, Vol 59 (6).
- Huang, Shu-hui. 2000. "Alternative Civilities: Democracy and Culture in China and Taiwan" dalam "Nook Review", *Contemporary Sociology* Nov 2000. Vol 29 (6).
- Lin, Kuo-ming. 2009."State, Civil Society, and Deliberative Democracy: the Pracrices of Concensus Conference in Taiwan" dalam "Abstract", *Taiwanese Sociology* No 17 (June 2009).
- Lin, Kuo-ming & Dung Sheng Chen. 2003 "Concensus Conference and Deliberative Democracy: Citizen Participation in Taiwan's National Health Insurance Policy", dalam "Abstract", *Taiwanese Sociology* No 6 (Des, 2003).

- Lucian. Rafael, 2009. "Politics and Church in Ven: Perspectives and Horizons", dalam *Theological Studies*. Washington, Vol 70.
- Rakowski, Cathy A.2003. "Women's Coalition as a Strategy at the Intersection of Economic and Political Change in Venezuela", dalam *International Journal of Political, Culture, and Society*. Vol 16 (3) Spring 2003
- Rosen, Fred. 2004/2005. Venezuelan Politics in the Chavez Era: Class, Polarization, and Conflicts, dalam *Science & Society* . New York, Winter, Vol 68. (Book Review buku Steve Ellner & Daniel Hellinger).
- Rosenberg, Shawn. 2005. "The Empirical Study of Deliberative Democracy: Setting a Research Agenda" dalam *Acta Politica* Vol 40, 2005.
- Siahaan, Maruarar. 2007."Relevansi Penguasaan Negara atas Cabang Produksi Strategis", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol 4 (3), September 2007.
- Wangsalegawa, Truly. 2009. "Origins of Indonesian Education Thoughts: The Among Method" dalam *Jurnal Ilmu & Budaya*, Edisi Emas, Vol 31 (22).
- Wald, Kenneth & Clyde Wilcox 2006. "Getting Religion: Has Political Science Rediscovered the faith factor ?". *American Political Science Review*. Vol. 100 (4), Nov.
- Zainuddin, A.Rahman. 1990."Pemikiran Politik" dalam *Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta: AIPI—Gramedia, No. 7.
- Zamharir, Hari. 2002. "Agama sebagai Puncak Hierarki Kebudayaan: Antithesis of Tillich (?)"dalam *Ilmu & Budaya* Thn XXIV / May 2004.

Sumber Internet:

- Amaral, Ricardo C., "Why Brazillians Should Demand the Renationalization of Petrobras" dalam *Website*. July 2008.

BBC NEWS “profile: Hugo Chavez” dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/akses24/09/2010>

Biografi Simon Bolivar dalam <http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-simon=bolivar.html>

Bell, Edward, “Catholicism and Democracy: A Reconsideration”, dalam <http://www.luc.edu/media/lucedu/dccirp/pdfs/Articles-Bell,Edward.pd>

Claude, Ake (1979) “Social Science as Imperialism: The Theory of Political Development” <http://www.africanmarket.com/front/product/asp>

Dieter, Senghaas. “Self Reliance and Autocentric Development: Historical Experiences and Contemporary Challenge”. sdi.sagepub.com/content/12/1/11_extract

Demerath dan Straight (2008) dalam, “Religion, Politics, and State”, in *Crosscurrent*; retrieved 5/5/2008)

Fernando Cabrera, 17-02-2009, “Revolusi Bolivarian Hugo Chavez” dalam, *Radio Nederland*. Akses 4/22/2010.

Fritze, Carien, “The Theory of Paulo Freire” in (*tanpa tahun*) “HUT ke 200, Oposisi Kecam Hugo Chavez”, Kompas, 20 April 2010. <http://internasional.kompas.com/read/2010/04/20/04>

Kennedy, Miranda “the graveyard of secular politics” in *These Times*. Web;retrieved 5/7/2009)

Hussain, Delwar. “Bangladeshis in east London: from secular politics to Islam” Web; retrieved 5/10/2006)

Lilla, Mark, “Coping with Political Theology” in <http://www.cato-unbound.org/2007/> accessed 6/23/2008
<http://www.equinoxjournals.com/ojs/index/php/PT>. Open Source Journals, Equinoc Publishing

Meyer, Thomas. 2004. Politics of Identity: the challenge of modern fundamentalism dalam *Politik Identitas*. Makalah, Jakarta: FES – Pemuda Muhammdiyah, h. 85- 87

Moltmann, Jurgen, "Political Theology" in <http://theologytoday.ptsem.edu> retrieved 6/23/2008. h.2;

Madsen, Richard, "The Upsurge of Religion in China" dalam *Journal of Democracy*, Oct 2010, Vol 21 (4): www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Madsen21-4.pdf

Orozco, Jose. 2004. "Latin America: Evangelical Christianity Moves the Masses—A Report from Venezuela" in *Relioscope*. 8 Dec. (www.religion.info/english/articles/article_121.shtml)

Pramudya, Wahyu. 2001. "Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, dan Pendidikan Kristen di Indonesia". Dalam <http://www.brazil.com/articles/194-July-2008> www.vhaedline.com/readnews.asp? (Akses 20 Nopember 2010)

"Paulo Freire" dalam http://www.oaseonline.org/artikel/magazinemangeng_freire

Ratzinger, Joseph. 2004. "Liberation Theology" <http://www.christendom-awake.org/pages/ratzinger/liberation>. akses 2/09/2009.

Segre, Sandro, (2011, "On Weber's and Habermas' Democratic Theories: A Reconstruction and Comparison", Kajian Sandro Segre (2011, "On Weber's and Habermas' Democratic Theories: A Reconstruction and Comparison", dalam *Logos Journal of Modern Society and Culture*, dalam http://logosjournal.com/2011/fall_segre/

Urbinat, Nadia, "Two Visions of Democracy", dalam *Dissent: A Quarterly of Politics and Culture*, dalam http://www.dissentmagazine.org/online_article/two-visions-of-democracy